

BINTARA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR POKOK KUALITAS PELAYANAN POLRI TERHADAP MASYARAKAT

Oleh : Bey Laksmana

Sejak beberapa waktu yang lalu, keluhan masyarakat terhadap pelayanan Polri sudah santer terdengar. Menghadapi keluhan masyarakat tersebut, pimpinan Polri telah mengupayakan perbaikan-perbaikan bahkan sejumlah anggota Polri telah pula ditindak karena terlibat dalam berbagai kasus pidana, penyalahgunaan wewenang ataupun karena pelanggaran disiplin yang berat.

Akhir-akhir ini dan pada masa-masa yang akan datang tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Polri akan semakin meningkat pula seiring dengan semakin meningkatnya pola pikir masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak Pembangunan Nasional dan era globalisasi.

Memperhatikan hal tersebut, apabila tidak diambil langkah-langkah perbaikan terutama ke dalam tubuh Polri sendiri akan dapat menyebabkan semakin merosotnya citra Polri, semakin banyaknya anggota Polri yang ditindak dan semakin banyak pula tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri yang terpaksa harus dilaksanakan oleh organ lain yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap eksistensi Polri.

Dari hasil pengamatan (sepintas), pengalaman dan pengetahuan penulis, sebab-sebab terjadinya keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Polri tersebut karena faktor-faktor intern dan ekstern antara lain :

- a. Kualitas Personil.
- b. Sarana dan prasarana Kesatuan.
- c. Dukungan anggaran dan logistik.
- d. Jumlah Personil.
- e. Kesejahteraan Personil.
- f. Masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan daftar susunan Personil dan Perafatan (DSPP), di dalam organisasi Polri, Personil Bintara merupakan kelompok terbesar, bahkan pada unit-unit organisasi Polri tertentu berdasarkan DSPP tidak ditemukan kelompok Tamtama, sehingga kelompok Bintara selain sebagai kelompok terbesar dalam organisasi Polri juga benar-benar merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas Polri di lapangan. Menurut buku petunjuk dasar tentang Pembinaan Prajurit ABRI, "Bintara berperan sebagai pimpinan unit kecil, Juru, Pelatih, pengawas serta tulang punggung pelaksanaan tugas ABRI; sedangkan Tamtama berperan sebagai pelaksana yang terpercaya dengan ketrampilan yang tinggi".

Selanjutnya menurut Buku Petunjuk Administrasi tentang Penggunaan Prajurit Polri dijelaskan bahwa "dalam golongan Bintara dan Tamtama kepangkatan tidak hanya menentukan kedudukan tetapi menunjukkan pula tingkat kecakapan serta tingginya pengetahuan yang telah dimiliki". Hal tersebut tercermin pada skema Pola Dasar Pembinaan Bintara/Tamtama sebagai berikut :

f) Pembagian kewenangan dalam tingkatan organisasi tidak jelas sehingga tidak terlihat adanya lapis-lapis kemampuan.

4) Pimpinan-pimpinan Reserse masih menitikberatkan pada hasil tidak pada prosedur/proses sehingga tidak jarang hasil yang didapat tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

5) Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas Reserse sangat kompleks antara lain:

a) Adanya peraturan/ketentuan per Undang-undangan yang tumpang tindih/membingungkan petugas.

b) Adanya campur tangan instansi lain.

c) Pengawasan dan pengendalian lemah.

d) Kerja sama antar fungsi lemah.

e) Sarana dan prasarana tidak memadai dalam menunjang penyidikan.

6) Upaya-upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Reserse:

a) Pemilihan/penunjukan/penempatan petugas Reserse dilakukan dengan pendidikan khusus Reserse.

b) Persyaratan ditentukan melalui psychotest.

c) Perlu dibentuk forum koordinasi C.J.S yang menitikberatkan pada kesamaan persepsi terhadap

hambatan Instrumen.

d) Pengembangan kemitraan dengan instansi terkait dengan instansi yang mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta lembaga-lembaga Sosial dan lain-lain.

e) Kurikulum pendidikan khusus Reserse tidak hanya menitikberatkan pada teknis ke Resersean saja tapi juga menitikberatkan pada pengetahuan/analisa hukum/per Undang-undangan.

f) Pembagian tugas kewenangan yang jelas antara tingkat Mabes sampai tingkat Polsek.

b. Saran.

1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Reserse sebaiknya tidak hanya melihat pada hasilnya tapi pada prosedur yang harus dipenuhi.

2) Sebaiknya dikeluarkan keputusan Kapolri dalam pembagian tugas/kewenangan yang jelas dari tingkat Mabes sampai tingkat Polsek.

3) Penunjukkan kepala-kepala Reserse mulai tingkat Polres sampai Mabes sebaiknya mempunyai S1 Hukum.

4) Program latihan baik secara teknis Keresersean maupun bantuan taktisnya selalu tercantum dalam Program kerja tahunan baik tingkat Mabes Polri maupun tingkat Polres.

Penulis adalah
Dosen Sespim Polri